

Ringkasan

Zumrotul Firdaus, NIM: 202202020169. Implementasi Inpres Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Plabuhan Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang. Pembimbing I: Dr. Imam Fachruddin, M.Si. Pembimbing II: Dr. IGG Heru Marwanto, MM.

Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) merupakan program inovasi pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 3 Tahun 2022 yang berisi instruksi kepada kementerian dan lembaga yang ditunjuk serta pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap narasumber yang berasal dari Penyuluh KB pembina wilayah kecamatan, Tim Koordinasi Kampung KB Desa Plabuhan dan warga masyarakat Desa Plabuhan. Proses analisis data menggunakan model yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Implementasi Inpres Nomor 3 Tahun 2022 di Desa Plabuhan telah berjalan dengan baik meskipun belum optimal. Adapun faktor pendukung utama adalah tersedianya dukungan sumber daya, kesesuaian karakteristik dan pembagian wewenang pelaksana kebijakan, serta kondisi sosial ekonomi yang kondusif. Sedangkan faktor penghambat di antaranya belum sesuai ukuran dan tujuan kebijakan dengan kondisi pelaksana di tingkat desa, belum adanya komunikasi yang efektif antara pelaksana kebijakan dengan masing-masing kementerian/lembaga/dinas terkait, serta kurangnya motivasi pelaksana kebijakan untuk memahami substansi isi kebijakan yang terdapat di dalam Inpres.

Perlu adanya standar dan tujuan kebijakan yang sesuai dengan kondisi pelaksana di tingkat desa dan masyarakat, serta pemahaman yang lebih mendalam dari para aparatur kebijakan tentang substansi yang terdapat di dalam Inpres. Selain itu perlu adanya komunikasi yang efektif antara pelaksana kebijakan dengan masing-masing kementerian/lembaga/dinas terkait dan peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan kegiatan di Kampung KB mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pemantauan dan evaluasi kegiatan sesuai yang diamanatkan dalam Inpres tersebut.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Instruksi Presiden, Kampung Keluarga Berkualitas, Optimalisasi.

Summary

Zumrotul Firdaus, NIM: 202202020169. Implementation of Presidential Instruction Number 3 of 2022 concerning the Optimization of Quality Family Village Management in Plabuhan Village, Plandaan District, Jombang Regency. Supervisor I: Dr. Imam Fachruddin, M.Si. Supervisor II: Dr. IGG Heru Marwanto, MM.

Quality Family Villages (Kampung KB) are a government innovation program aimed at improving the quality of life of the community. To optimize the implementation of Quality Family Villages, the Government issued Presidential Instruction of the Republic of Indonesia (Inpres) Number 3 of 2022, which contains instructions to the appointed ministries, institutions, and regional governments to formulate policies and take coordinated and integrated actions in accordance with their respective duties, functions, and authorities.

This research uses descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques used observation, interviews and documentation of sources who came from family planning instructors in the sub-district, the family planning village coordination team in Plabuhan Village and residents of the Plabuhan Village community. The data analysis process uses the model proposed by Miles and Huberman

The research results show that the implementation of Presidential Instruction no. 3 of 2022 in Plabuhan Village has been progressing well, though not yet optimal. The main supporting factors are the availability of resources, support, the suitability of characteristics and the distribution of policy implementation authority, as well as conducive socio-economic conditions. Meanwhile, inhibiting factors include the misalignment of policy standards and objectives with the conditions of implementation at the village level, the lack of effective communication between policy implementers and the relevant ministries/institutions/departments, and the insufficient motivation of policy implementers to understand the substance of the policy content contained in the Presidential Instruction.

There is a need for policy standards and objectives that align with the conditions at the village and community levels, as well as a deeper understanding from policy officials regarding the substance contained in the Presidential Instruction. Apart from that, there needs to be effective communication between policy implementers and each relevant ministry/institution/department and increasing community participation in planning activities in KB villages starting from the planning, implementation, to monitoring and evaluation stages of activities as mandated in the Presidential Instruction.

Keywords: Policy Implementation, Presidential Instruction, Quality Family Village, Optimization.